



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Jambi

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaikan kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Menguatkan sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



 SRI MULYANI INDRAWATI 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI JAMBI	12
1. PROVINSI JAMBI.....	13
2. KAB. BATANG HARI	14
3. KAB. BUNGO	15
4. KAB. KERINCI	16
5. KAB. MERANGIN	17
6. KAB. MUARO JAMBI.....	18
7. KAB. SAROLANGUN.....	19
8. KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	20
9. KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR.....	21
10. KAB. TEBO	22
11. KOTA JAMBI	23
12. KOTA SUNGAI PENUH	24
TIM PENYUSUN BUKU.....	25

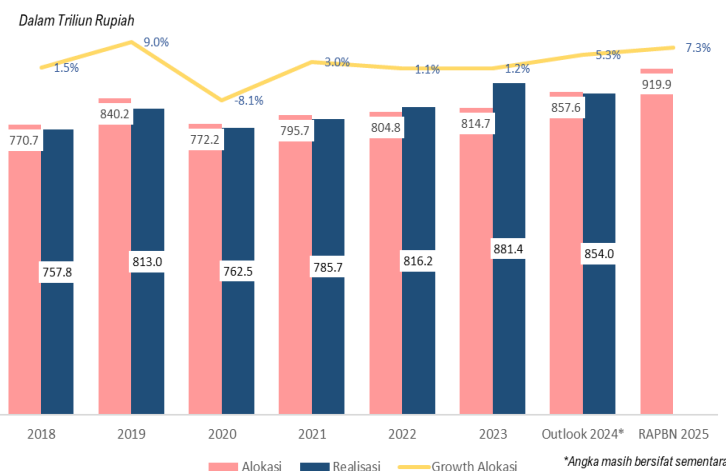


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

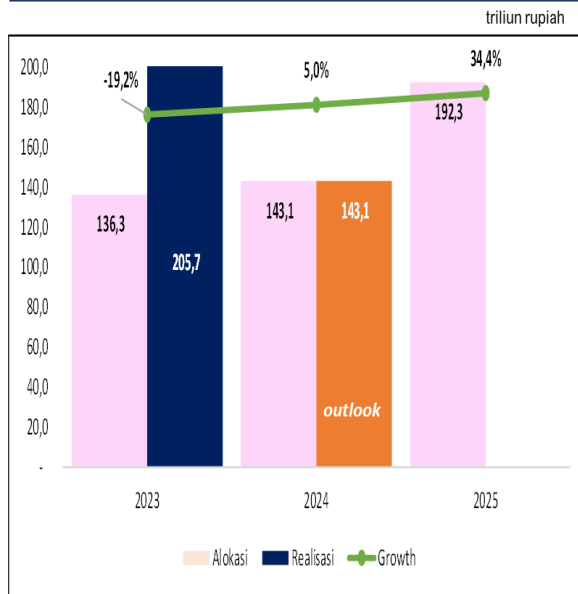
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

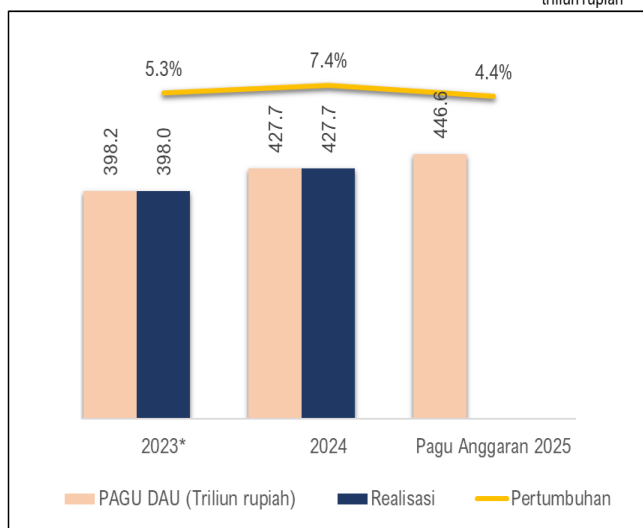


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

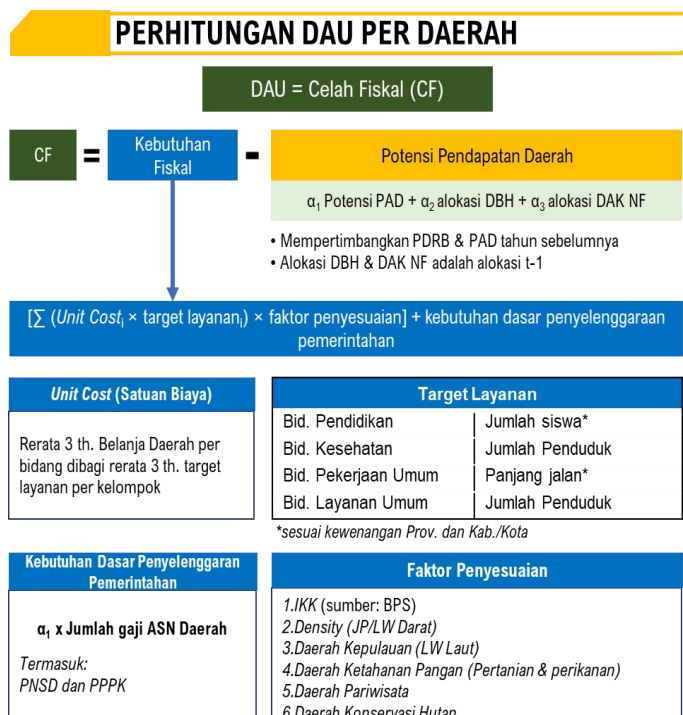
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

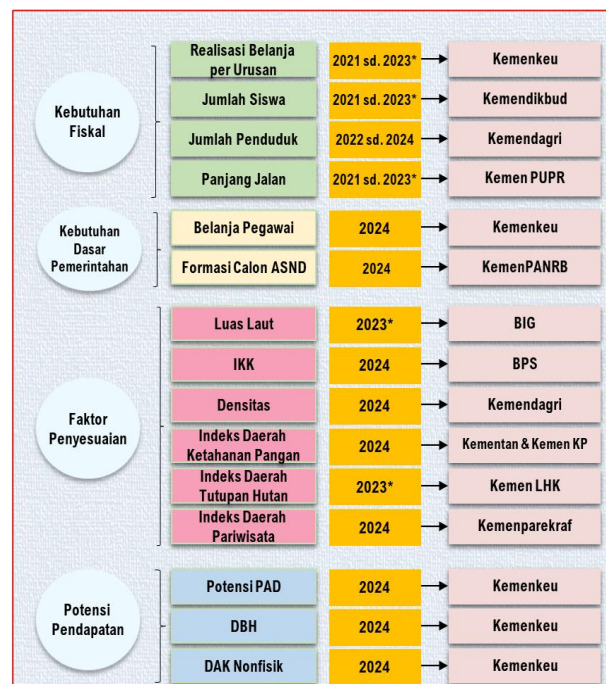
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk dukungan kebijakan penggalangan formasi ASD yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggalangan PPPK 2025, dan dukungan penggalangan PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung anggaran infrastruktur sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar 19,3% dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar 19,7% dari total DAU

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggalangan PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

- Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
- Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
- Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar – 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
- Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

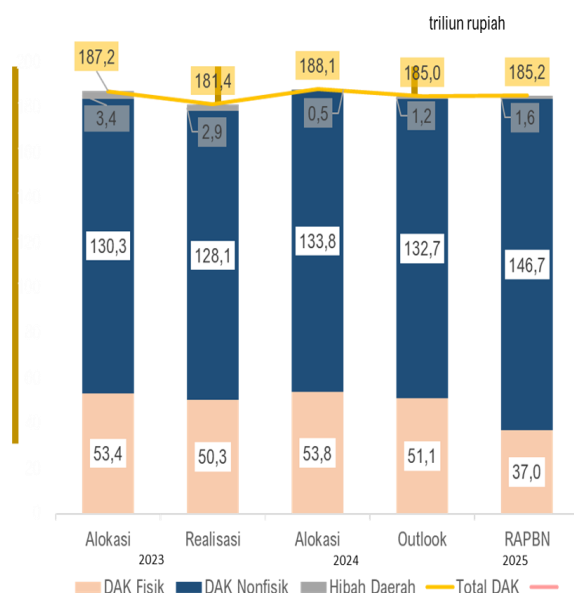
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 - Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 - Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

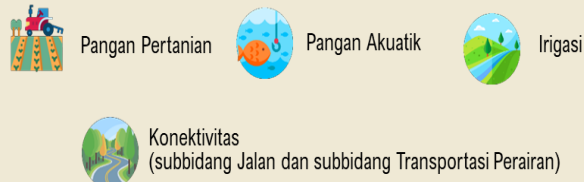
- DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
- DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
- Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
- Matching program** dan **sinergi pendanaan.**
- Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

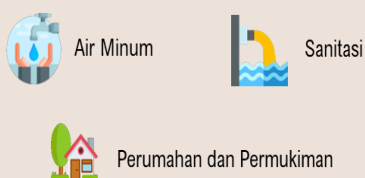
DAK Fisik Layanan Dasar



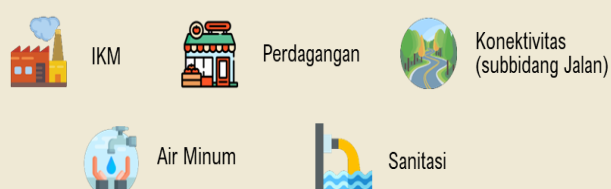
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

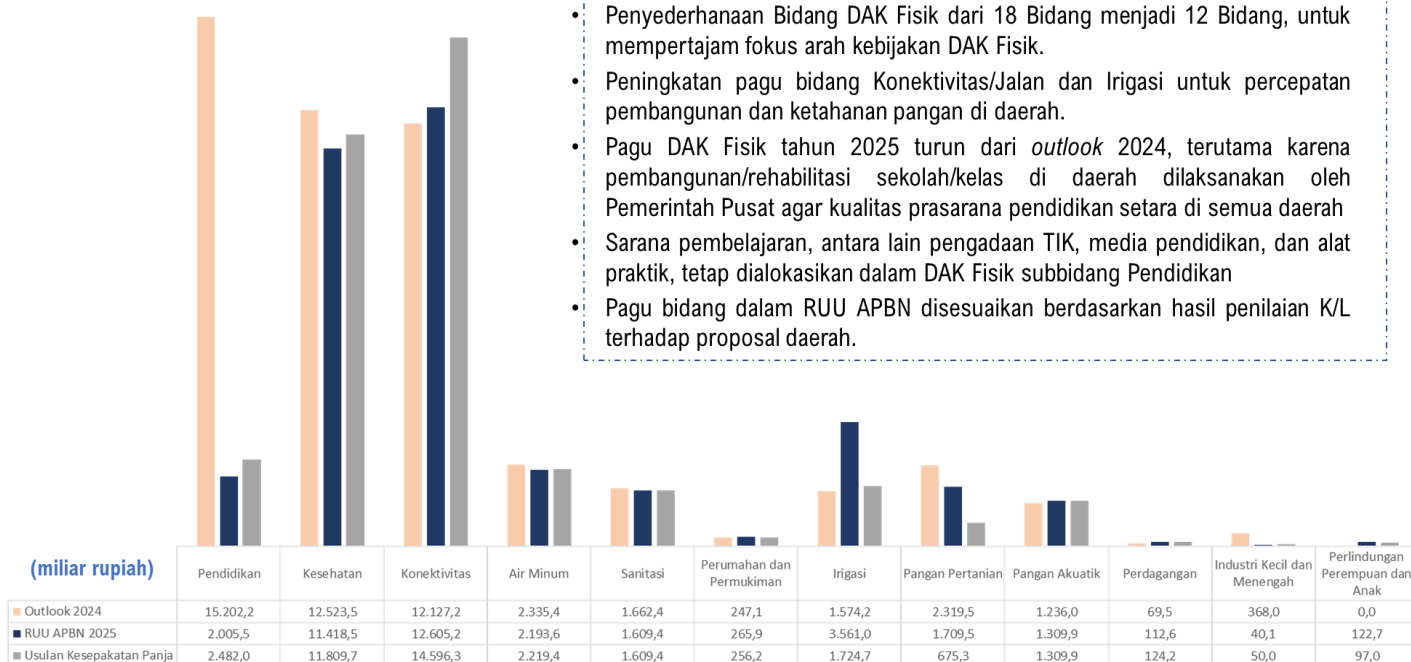


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

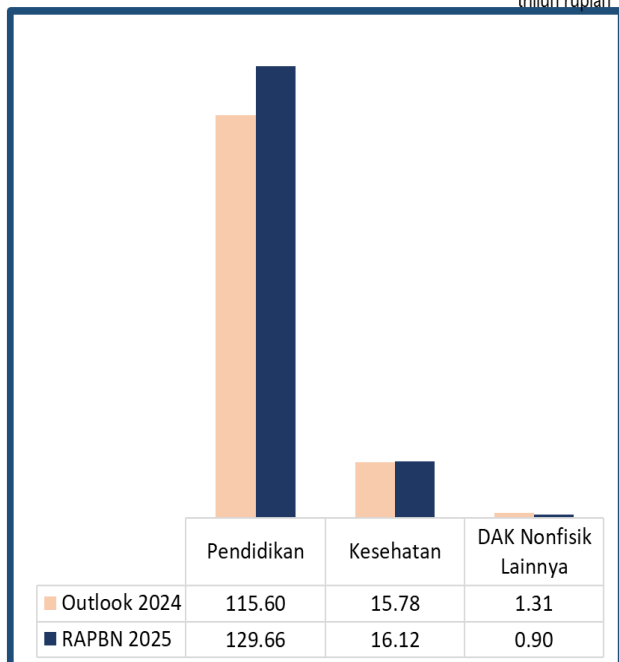
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



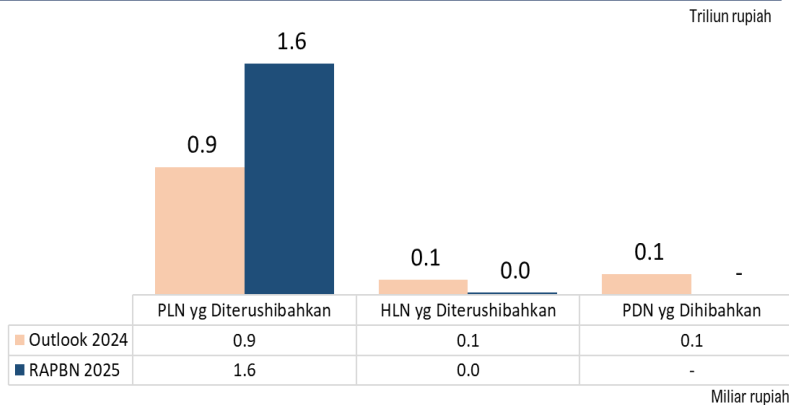
Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

No.	Rincian DAK NonFisik	Miliar rupiah	
		Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesenjangan	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:



PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.



PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

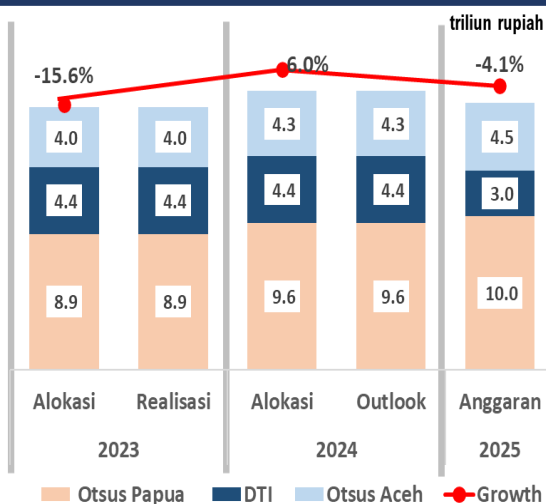


LINGKUNGAN HIDUP

- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



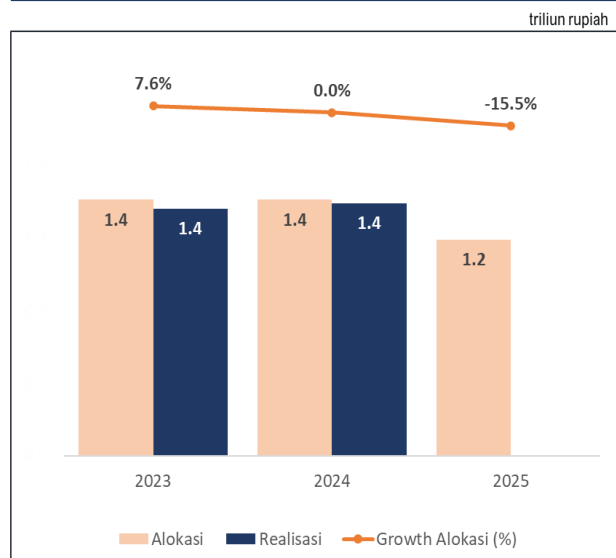
- Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

- Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
- Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
- Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
- Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

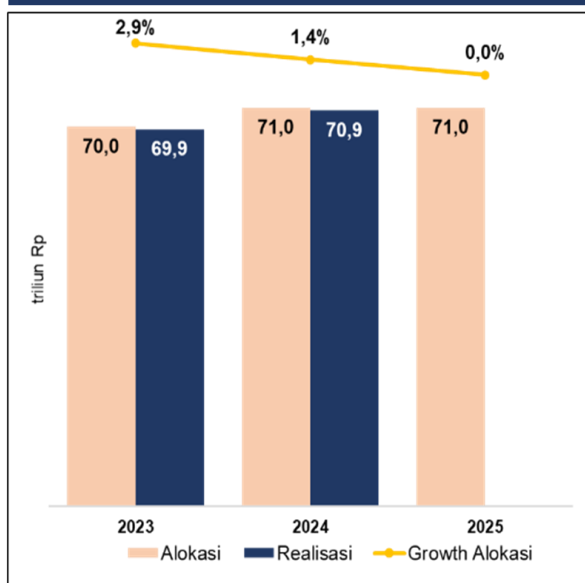
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

- Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - penurunan tingkat kemiskinan;
 - pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
- Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
- Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

- Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa melalui:
 - penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - pemberian *reward* penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
- Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa melalui:
 - penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - dukungan program ketahanan pangan,
 - pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - percepatan implementasi desa digital,
 - pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - program sektor prioritas lainnya di desa.
- Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

Yang terdiri atas:

A

Sebesar **Rp69 T** pengalokasiannya dihitung sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula = AD + AA + AK + AF



Alokasi Dasar (AD) sebesar 65% dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk



Alokasi Afirmasi (AA) sebesar 1% dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AA untuk Desa Tertinggal sebesar Rp106,6 juta/desa. Untuk Desa Sangat Tertinggal Rp167,2 juta/desa.



Alokasi Kinerja (AK) sebesar 4% (empat persen) dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Penilaian AK dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota

Dalam kurun 2022-2024, rata-rata penerima AK sebesar Rp235,6 juta/desa.



Alokasi Formula (AF) sebesar 30% dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa



B

Sebesar **Rp2 T** dialokasikan dan disalurkan sebagai Insentif Desa pada tahun anggaran berjalan berdasarkan kinerja desa atas peningkatan tata kelola keuangan desa dan penghargaan yang diberikan oleh kementerian/lembaga



Pagu sebesar Rp2T dialokasikan kepada desa berdasarkan pemenuhan Kriteria Utama dan capaian Kriteria Kinerja. **Kriteria Kinerja meliputi:**

1. Kinerja Pemerintahan Desa, yang terdiri dari:
 - o Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa
 - o Tata Kelola Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan Desa
2. Penghargaan Kementerian/lembaga

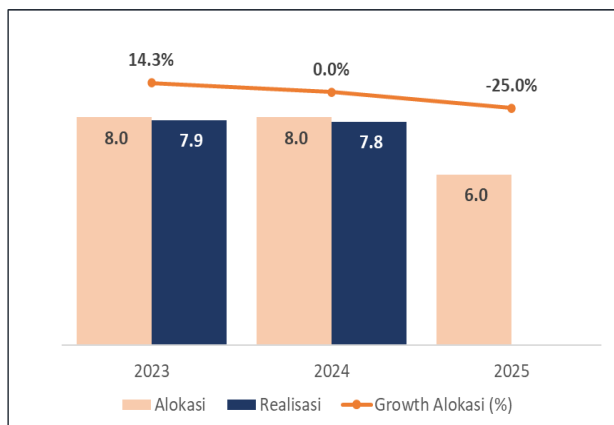


Penyaluran dilakukan terpisah dengan penyaluran pagu berdasarkan formula regular.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

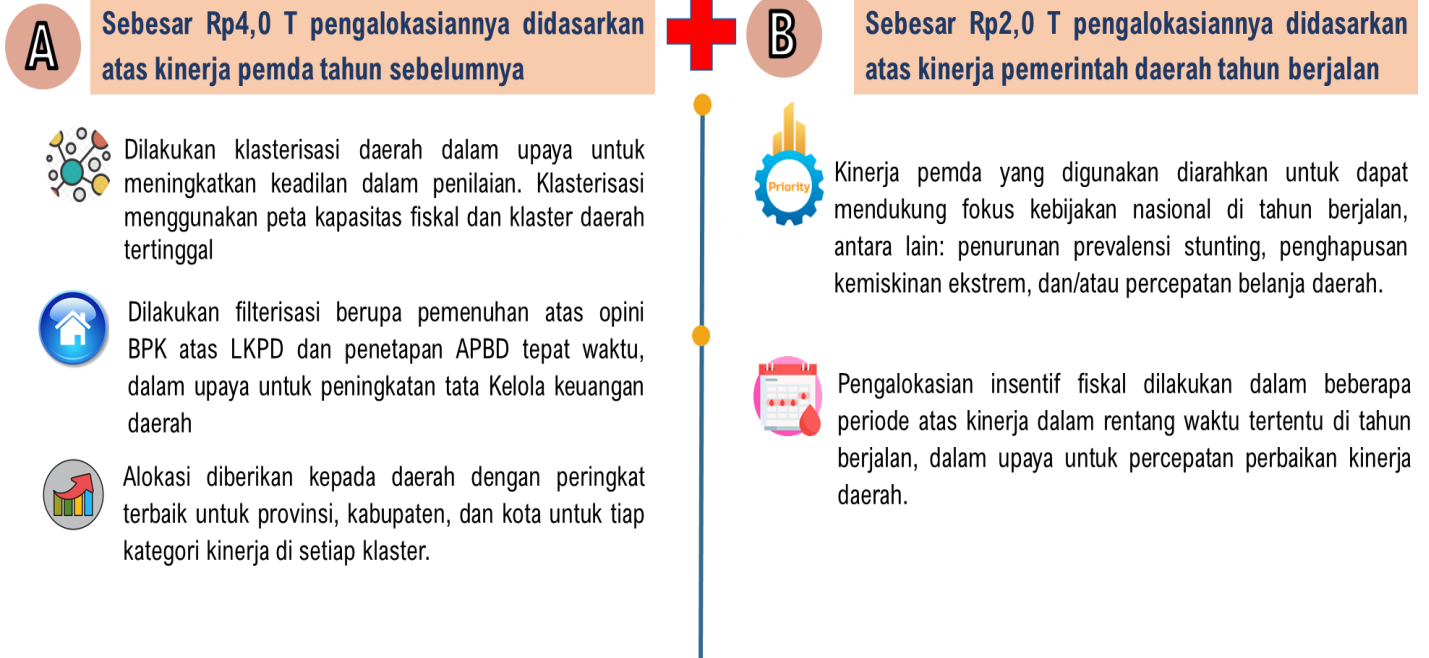
KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

1. Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
2. Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
3. Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
4. Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:





RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAMBI

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	HIBAH KE DAERAH	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI JAMBI	468.956.085	1.418.765.691	114.830.394	482.471.145	14.051.587	-	-	2.499.074.902
2	KAB. BATANG HARI	287.407.982	640.193.127	74.871.938	162.933.188		98.664.747	7.102.753	1.271.173.735
3	KAB. BUNGO	145.569.351	646.429.110	35.252.895	147.818.111		121.081.033	7.270.930	1.103.421.430
4	KAB. KERINCI	64.605.568	636.457.561	46.410.562	148.361.929		209.727.043	7.362.332	1.112.924.995
5	KAB. MERANGIN	105.168.646	751.238.673	68.331.555	201.171.766		169.672.646	-	1.295.583.286
6	KAB. MUARO JAMBI	288.443.678	695.512.115	75.189.879	192.214.711		135.244.058	7.347.552	1.393.951.993
7	KAB. SAROLANGUN	218.090.746	627.358.793	58.746.280	142.824.171		127.397.938	7.419.814	1.181.837.742
8	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	810.050.997	589.710.108	54.127.080	162.937.702		97.926.532	-	1.714.752.419
9	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	254.064.544	565.389.080	52.495.991	128.449.359		68.317.387	7.383.633	1.076.099.994
10	KAB. TEBO	153.090.698	582.268.338	39.935.112	153.573.980		113.656.525	7.937.702	1.050.462.355
11	KOTA JAMBI	125.956.264	847.731.160	45.358.307	209.545.020		-	-	1.228.590.751
12	KOTA SUNGAI PENUH	55.422.776	476.439.418	53.264.069	70.346.848		49.706.403	7.631.633	712.811.147
JUMLAH		2.976.827.335	8.477.493.174	718.814.062	2.202.647.930	14.051.587	1.191.394.312	59.456.349	15.640.684.749

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PROVINSI JAMBI



(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.499.074.902
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	468.956.085
1. DBH Pajak	189.002.642
a. Pajak Penghasilan	68.384.286
b. Pajak Bumi dan Bangunan	118.805.097
c. Cukai Hasil Tembakau	1.813.259
2. DBH Sumber Daya Alam	267.290.401
a. Migas	180.631.155
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	80.643.756
c. Kehutanan	6.015.490
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	12.663.042
a. Perkebunan Sawit	12.663.042
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.418.765.691
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.170.253.176
2. DAU ditentukan penggunaannya	248.512.515
a. Penggajian Formasi PPPK	35.683.394
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	109.838.295
d. Bidang Kesehatan	50.721.441
e. Bidang Pekerjaan Umum	52.269.385
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	597.301.539
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	114.830.394
a. Pendidikan	40.063.505
b. Kesehatan	32.227.926
c. Konektivitas	20.225.556
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	16.708.407
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	5.605.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	482.471.145
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	220.891.498
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	250.082.506
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	5.617.231
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	4.429.250
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Hibah ke Daerah	14.051.587
1. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	-
2. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	14.051.587
E. Dana Desa	-
F. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BATANG HARI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.271.173.735
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	287.407.982
1. DBH Pajak	85.906.118
a. Pajak Penghasilan	6.517.782
b. Pajak Bumi dan Bangunan	79.388.336
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	194.900.616
a. Migas	123.329.838
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	67.453.716
c. Kehutanan	3.283.257
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	6.601.248
a. Perkebunan Sawit	6.601.248
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	640.193.127
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	440.558.885
2. DAU ditentukan penggunaannya	199.634.242
a. Penggajian Formasi PPPK	67.259.480
b. Pendanaan Kelurahan	2.800.000
c. Bidang Pendidikan	63.011.944
d. Bidang Kesehatan	33.621.902
e. Bidang Pekerjaan Umum	32.940.916
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	237.805.126
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	74.871.938
a. Pendidikan	2.378.311
b. Kesehatan	17.115.881
c. Konektivitas	45.051.814
d. Air Minum	1.141.000
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	7.376.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.808.932
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	162.933.188
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	49.264.223
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	86.979.918
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.540.687
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.747.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	98.664.747
E. Insentif Fiskal	7.102.753

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. BUNGO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.103.421.430
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	145.569.351
1. DBH Pajak	29.034.883
a. Pajak Penghasilan	9.805.647
b. Pajak Bumi dan Bangunan	19.229.236
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	110.885.410
a. Migas	30.727.117
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	78.848.796
c. Kehutanan	475.692
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	5.649.058
a. Perkebunan Sawit	5.649.058
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	646.429.110
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	485.204.372
2. DAU ditentukan penggunaannya	161.224.738
a. Penggajian Formasi PPPK	24.973.729
b. Pendanaan Kelurahan	2.400.000
c. Bidang Pendidikan	61.604.713
d. Bidang Kesehatan	49.014.366
e. Bidang Pekerjaan Umum	23.231.930
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	183.071.006
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	35.252.895
a. Pendidikan	1.952.780
b. Kesehatan	17.454.844
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	11.088.921
e. Sanitasi	4.756.350
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	147.818.111
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	55.277.000
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	65.354.908
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	21.052.503
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.283.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	121.081.033
E. Insentif Fiskal	7.270.930

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KERINCI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.112.924.995
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	64.605.568
1. DBH Pajak	14.023.554
a. Pajak Penghasilan	4.810.581
b. Pajak Bumi dan Bangunan	9.212.973
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	47.713.781
a. Migas	30.722.867
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	14.808.572
c. Kehutanan	436.437
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	912.100
3. DBH Lainnya	2.868.233
a. Perkebunan Sawit	2.868.233
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	636.457.561
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	483.535.143
2. DAU ditentukan penggunaannya	152.922.418
a. Penggajian Formasi PPPK	13.938.826
b. Pendanaan Kelurahan	400.000
c. Bidang Pendidikan	58.198.322
d. Bidang Kesehatan	33.984.176
e. Bidang Pekerjaan Umum	46.401.094
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	194.772.491
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	46.410.562
a. Pendidikan	1.351.162
b. Kesehatan	17.360.000
c. Konektivitas	25.293.426
d. Air Minum	2.405.974
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	148.361.929
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	35.408.205
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	80.867.954
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	25.281.270
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	6.804.500
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	209.727.043
E. Insentif Fiskal	7.362.332

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MERANGIN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.295.583.286
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	105.168.646
1. DBH Pajak	14.913.029
a. Pajak Penghasilan	5.912.460
b. Pajak Bumi dan Bangunan	9.000.569
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	85.241.172
a. Migas	30.930.417
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	52.901.137
c. Kehutanan	593.183
d. Perikanan	816.435
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	5.014.445
a. Perkebunan Sawit	5.014.445
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	751.238.673
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	553.363.379
2. DAU ditentukan penggunaannya	197.875.294
a. Penggajian Formasi PPPK	34.870.295
b. Pendanaan Kelurahan	2.000.000
c. Bidang Pendidikan	72.452.621
d. Bidang Kesehatan	40.392.610
e. Bidang Pekerjaan Umum	48.159.768
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	269.503.321
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.331.555
a. Pendidikan	3.216.920
b. Kesehatan	25.517.387
c. Konektivitas	27.845.619
d. Air Minum	11.751.629
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	201.171.766
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	61.001.901
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	96.055.811
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	36.930.754
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.183.300
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	169.672.646
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. MUARO JAMBI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.393.951.993
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	288.443.678
1. DBH Pajak	102.658.133
a. Pajak Penghasilan	9.011.894
b. Pajak Bumi dan Bangunan	93.646.239
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	178.765.392
a. Migas	135.095.387
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	41.231.762
c. Kehutanan	1.604.438
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	7.020.153
a. Perkebunan Sawit	7.020.153
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	695.512.115
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	520.901.054
2. DAU ditentukan penggunaannya	174.611.061
a. Penggajian Formasi PPPK	46.239.730
b. Pendanaan Kelurahan	1.000.000
c. Bidang Pendidikan	61.556.516
d. Bidang Kesehatan	40.604.468
e. Bidang Pekerjaan Umum	25.210.347
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	267.404.590
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	75.189.879
a. Pendidikan	2.384.694
b. Kesehatan	30.067.310
c. Konektivitas	31.488.365
d. Air Minum	8.030.114
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	3.219.396
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	192.214.711
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	58.080.210
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	100.365.080
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.269.421
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	5.500.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	135.244.058
E. Insentif Fiskal	7.347.552

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. SAROLANGUN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.181.837.742
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	218.090.746
1. DBH Pajak	55.977.831
a. Pajak Penghasilan	6.551.781
b. Pajak Bumi dan Bangunan	49.426.050
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	157.504.045
a. Migas	77.348.827
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	78.364.969
c. Kehutanan	939.073
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	4.608.870
a. Perkebunan Sawit	4.608.870
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	627.358.793
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	420.083.741
2. DAU ditentukan penggunaannya	207.275.052
a. Penggajian Formasi PPPK	83.772.342
b. Pendanaan Kelurahan	1.800.000
c. Bidang Pendidikan	43.063.066
d. Bidang Kesehatan	31.580.911
e. Bidang Pekerjaan Umum	47.058.733
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	201.570.451
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	58.746.280
a. Pendidikan	2.977.000
b. Kesehatan	14.545.500
c. Konektivitas	31.437.009
d. Air Minum	9.042.088
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	744.683
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	142.824.171
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	53.022.564
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	65.813.420
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	18.140.027
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.597.500
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	850.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	127.397.938
E. Insentif Fiskal	7.419.814

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.714.752.419
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	810.050.997
1. DBH Pajak	229.974.614
a. Pajak Penghasilan	7.762.522
b. Pajak Bumi dan Bangunan	222.212.092
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	574.134.442
a. Migas	546.847.516
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	21.899.218
c. Kehutanan	4.342.032
d. Perikanan	1.045.676
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	5.941.941
a. Perkebunan Sawit	5.941.941
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	589.710.108
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	453.884.204
2. DAU ditentukan penggunaannya	135.825.904
a. Penggajian Formasi PPPK	12.777.257
b. Pendanaan Kelurahan	4.000.000
c. Bidang Pendidikan	53.075.780
d. Bidang Kesehatan	31.064.448
e. Bidang Pekerjaan Umum	34.908.419
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	217.064.782
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.127.080
a. Pendidikan	762.986
b. Kesehatan	10.652.005
c. Konektivitas	37.632.777
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	5.079.312
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	162.937.702
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	54.272.075
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	81.336.073
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.481.454
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.848.100
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	97.926.532
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.076.099.994
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	254.064.544
1. DBH Pajak	65.501.548
a. Pajak Penghasilan	7.597.315
b. Pajak Bumi dan Bangunan	57.904.233
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	184.223.346
a. Migas	151.272.657
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	30.001.936
c. Kehutanan	1.500.057
d. Perikanan	1.448.696
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	4.339.650
a. Perkebunan Sawit	4.339.650
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	565.389.080
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	429.562.267
2. DAU ditentukan penggunaannya	135.826.813
a. Penggajian Formasi PPPK	6.969.413
b. Pendanaan Kelurahan	4.000.000
c. Bidang Pendidikan	32.478.353
d. Bidang Kesehatan	38.143.802
e. Bidang Pekerjaan Umum	54.235.245
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	180.945.350
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	52.495.991
a. Pendidikan	407.928
b. Kesehatan	3.210.400
c. Konektivitas	33.191.637
d. Air Minum	9.794.331
e. Sanitasi	1.192.000
f. Perumahan dan Permukiman	4.699.695
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	128.449.359
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	36.579.331
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	64.156.747
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	23.214.681
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.748.600
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	68.317.387
E. Insentif Fiskal	7.383.633

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KAB. TEBO

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.050.462.355
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	153.090.698
1. DBH Pajak	34.599.132
a. Pajak Penghasilan	5.685.665
b. Pajak Bumi dan Bangunan	28.913.467
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	113.456.935
a. Migas	77.752.825
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	32.758.306
c. Kehutanan	2.111.999
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	5.034.631
a. Perkebunan Sawit	5.034.631
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	582.268.338
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	460.873.005
2. DAU ditentukan penggunaannya	121.395.333
a. Penggajian Formasi PPPK	9.292.550
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	55.296.112
d. Bidang Kesehatan	32.754.768
e. Bidang Pekerjaan Umum	22.651.903
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	193.509.092
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	39.935.112
a. Pendidikan	1.166.653
b. Kesehatan	9.642.158
c. Konektivitas	23.752.990
d. Air Minum	5.373.311
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	153.573.980
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	57.036.688
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	68.564.451
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	22.548.141
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.924.700
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	113.656.525
E. Insentif Fiskal	7.937.702

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA JAMBI

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.228.590.751
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	125.956.264
1. DBH Pajak	82.082.845
a. Pajak Penghasilan	44.572.201
b. Pajak Bumi dan Bangunan	37.510.644
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	40.908.809
a. Migas	31.673.352
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	7.985.444
c. Kehutanan	416.208
d. Perikanan	833.805
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	2.964.610
a. Perkebunan Sawit	2.964.610
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	847.731.160
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	680.624.866
2. DAU ditentukan penggunaannya	167.106.294
a. Penggajian Formasi PPPK	76.547.384
b. Pendanaan Kelurahan	13.600.000
c. Bidang Pendidikan	55.595.760
d. Bidang Kesehatan	17.284.569
e. Bidang Pekerjaan Umum	4.078.581
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	254.903.327
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.358.307
a. Pendidikan	1.527.888
b. Kesehatan	35.551.476
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	3.750.000
e. Sanitasi	4.528.943
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	209.545.020
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	91.487.950
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	97.175.952
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	16.027.028
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	4.348.400
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	-

DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 KOTA SUNGAI PENUH

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	712.811.147
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	55.422.776
1. DBH Pajak	13.180.456
a. Pajak Penghasilan	5.560.266
b. Pajak Bumi dan Bangunan	7.620.190
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	40.712.122
a. Migas	31.362.927
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	8.107.840
c. Kehutanan	390.179
d. Perikanan	851.176
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.530.198
a. Perkebunan Sawit	1.530.198
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	476.439.418
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	348.534.588
2. DAU ditentukan penggunaannya	127.904.830
a. Penggajian Formasi PPPK	48.730.134
b. Pendanaan Kelurahan	800.000
c. Bidang Pendidikan	32.053.441
d. Bidang Kesehatan	35.631.349
e. Bidang Pekerjaan Umum	10.689.906
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	123.610.917
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.264.069
a. Pendidikan	312.054
b. Kesehatan	5.821.119
c. Konektivitas	33.456.529
d. Air Minum	8.003.914
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	5.670.453
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	70.346.848
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	14.193.900
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	37.459.917
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.017.841
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.669.500
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	500.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	49.706.403
E. Insentif Fiskal	7.631.633

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	1. Ludiro 2. Sandy Firdaus 3. Purwanto 4. Jaka Sucipta 5. Lydia Kurniawati Christyana 6. Adriyanto 7. Agung Widiadi	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Dana Transfer Umum Direktur Dana Transfer Khusus Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum 2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam 4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum 5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan 6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman 7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik 8. Tim Reguler Hibah Daerah 9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus 10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa 11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus 12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan 13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710



2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta – 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

